



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 80).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maliki
pada tanggal 25 November 2019

KETUA DPRD,

YAMRAN SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		RA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Pengaturan pembentukan hukum adat mengenai masyarakat	√	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. DPMD 3. Disparbudmudora 4. Bapelitbangda 5. Kesbangpol 6. DPKPP 7. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan I 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur	√	-	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	√	-	1. Disparbudmudora 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan I 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
3	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan	Penambahan Nilai Penyertaan Modal	-	√	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	-	√	1. Bapelitbangda 2. PU & PR 3. Satuan Pol-PP & Damkar 4. PDAM	Triwulan I 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum									
4	Peraturan Daerah	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur TA. 2019	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	√	-	Semua SKPD	Triwulan I 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
5	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Peninjauan atas Besaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	1. DPKPP 2. Satuan Pol-PP & Damkar 3. Kecamatan	Triwulan II 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
6	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	- Memasukkan 5 (lima) pelabuhan sebagai objek dan subjek retribusi yakni : - Pelabuhan Matano - Pelabuhan Bantilang - Pelabuhan Loeha - Pelabuhan Laut Lampia - Perubahan atas struktur tariff yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan - Penyesuaian tariff retribusi pelayanan kepelabuhanan yang tidak sesuai dan memberatkan masyarakat	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	- BPKD - Satuan Pol-PP & Damkar - Bagian Hukum - Camat Towuti - Camat Nuha - Camat Malili - Kantor UPP Kelas III Malili	Triwulan II 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Dinas Perhubungan (Dishub)

7	Peraturan Daerah	Badan Permusyawaratan Desa	Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	√	-	Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
8	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031	Perubahan acuan normative disesuaikan dengan perundang-undangan terbaru, perubahan peruntukan ruang, dan penegasan pengaturan ruang secara menyeluruh baik ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi	-	√	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota	-	√	1. DPKPP 2. Dinas PU & PR 3. DPM & PTSP 4. DLH 5. Satuan Pol-PP & Damkar 6. DPRD	Triwulan III 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelibangda)
9	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur TA.2020	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	√	Semua SKPD	Triwulan III 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
10	Peraturan Daerah	Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu	Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa secara serentak dan antar waktu	√	-	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Disdukcapil 4. BKPSDM 5. Satuan Pol-PP & Damkar 6. Kesbangpol	Triwulan III 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
11	Peraturan Daerah	Kepemudaan		√	-					Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : DPRD

12	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	-	Semua SKPD	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
13	Peraturan Daerah	Naskah Hari Jadi Luwu Timur	-				√			Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
14	Peraturan Daerah	Etika Pemerintahan	-				√			Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
15	Peraturan Daerah	Kepariwisata	-				√		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
16	Peraturan Daerah	Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	-				√			Lanjutan	Pemrakarsa : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Peraturan Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya				√			Lanjutan	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KETUA DPRD,

JAMRAN SYAM